



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 24, No. 1, APRIL 2010

ISSN - 0215-8809

≡ **USAHA KECIL BERSPEKTRUM LUAS: INDUSTRI PRIBUMI DI DAERAH YOGYAKARTA 1830-AN – 1930-AN**

Anton Haryono

≡ **HAKEKAT PENDIDIKAN SEJARAH**

H. Purwanta

≡ **PARADIGMA PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS KONSTRUKTIVISME**

Y.R. Subakti

≡ **PENELITIAN TINDAKAN KELAS DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU**

Th. Sumini

≡ **PERANAN SUTAN SYAHRIR DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA (1945-1947)**

Bernarda Prihartanti

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

HISTORIA VITAE adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/ atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/ atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggung jawab/ : Dr. Anton Haryono, M.Hum.
Pemimpin Redaksi
Anggota Dewan Redaksi : Drs. B. Musidi, M.Pd.
Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.
Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

REDAKTUR AHLI

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya SJ, M.A. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Dr. S. Nawiyanto Universitas Jember

REDAKTUR PELAKSANA

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.
Dra. Theresia Sumini, M.Pd.
Drs. A.A. Padi

SEKRETARIAT ADMINISTRASI

R. Marsidiq

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383
Telegram: SADHAR YOGYA
E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| Daftar Isi | i |
| Editorial | iii |
| <i>Usaha Kecil Berspektrum Luas: Industri Pribumi di Daerah Yogyakarta 1830-an - 1930-an</i> | 1 - 23 |
| <i>Anton Haryono</i> | |
| Hakekat Pendidikan Sejarah | 24 - 37 |
| <i>H. Purwanta</i> | |
| <i>Paradigma Pembelajaran Sejarah Berbasis Konstruktivisme</i> | 38 - 70 |
| <i>Y.R. Subakti</i> | |
| Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Profesi Guru | 71 - 91 |
| <i>Th. Sumini</i> | |
| <i>Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947)</i> | 92 - 110 |
| <i>Bernarda Prihartanti</i> | |

HAKEKAT PENDIDIKAN SEJARAH

H. Purwanta

Abstract

Through this article, I want to discuss the nature of history education. Question that I arise is department of history education, as part of faculty of education, only as dissemination institution of department of history? To answer the question, I try to find out from philosophical perspective of education. Epistemologically, history education is to infuse history consciousness to youth. On the other hand, the goal of history as a branch of sciences is to explain important events of the past. It means that history education is different from science of history.

A. Permasalahan

Pada awal tahun 2000 an, melalui artikel di *Warta Kampus*, saya pernah mempertanyakan perbedaan antara Prodi Pendidikan Sejarah dengan Prodi Ilmu Sejarah. Pertanyaan itu bukan sekali-kali ingin menghinakan salah satu cabang ilmu pengetahuan, tetapi mengajak (atau boleh juga dimaknai menantang) untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh eksistensi masing-masing. Apabila memang berbeda, maka sudah layak dan sepiantasnya masing-masing berjalan sendiri. Akan tetapi, apabila antar keduanya memiliki banyak persamaan, maka perlu dipertimbangkan untuk menyatukannya. Meskipun demikian, keputusan penyatuan atau pemisahan tersebut perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam, terutama tentang persamaan yang terdapat dalam praksis pada Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah. Paling tidak, ada dua kemungkinan terjadinya berbagai persamaan antara prodi Pendidikan Sejarah dengan Ilmu Sejarah. Pertama adalah bahwa keduanya sebetulnya memiliki kodrat yang sungguh berbeda. Persamaan yang ada diantara keduanya lebih merupakan akibat terjadinya “salah jalan” pada salah satu prodi. Bila itu terjadi, maka prodi Pendidikan Sejarah yang berpeluang besar menelusuri jalan yang

Drs. H. Purwanta, M.A., adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

salah tersebut. Kedua, pada hakekatnya prodi Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah memang dikodratkan memiliki banyak kesamaan dari sejak awalnya.

Pemerintah nampaknya berpandangan pada kemungkinan yang terakhir, yaitu bahwa pada hakekatnya kedua program studi, Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, adalah sama atau paling tidak memiliki banyak kesamaan. Asumsi tersebut juga berlaku untuk semua prodi yang terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hal itu tercermin dari kebijakannya untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Asumsi yang menarik dari kebijakan tersebut adalah bahwa lulusan prodi kependidikan dan non kependidikan memiliki kesederajatan kemampuan. Direktorat Pendidikan Tinggi pada tanggal 24 Oktober 2008 melakukan rilis berita sebagai berikut:

Pemerintah menyediakan tempat 40.000 kursi bagi sarjana jurusan apa pun untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Berbekal sertifikat pendidikan profesi inilah, sarjana bisa melamar menjadi guru pegawai negeri sipil maupun guru swasta.

"Nantinya, yang bisa menjadi guru hanyalah mereka yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (22/10). Penetapan kuota 40.000 calon guru itu sudah mendekati kebutuhan riil guru untuk menggantikan guru yang pensiun dan permintaan tenaga pendidik baru

Menurut Fasli, sarjana nonpendidikan yang bisa mengikuti pendidikan ini adalah para sarjana yang ingin menjadi guru mata pelajaran di tingkat SMP, SMA dan SMK. Adapun untuk menjadi guru TK dan SD, hanya bisa diikuti sarjana pendidikan TK dan SD.

Pendidikan Profesi Guru, lanjut Fasli, untuk sarjana nonpendidikan berlangsung selama enam bulan, sementara untuk sarjana pendidikan TK dan SD selama satu tahun. (http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=54)

Banyak kritik muncul terhadap kebijakan penyelenggaraan PPG, terutama dari para pakar pendidikan. Salah satu kritik yang muncul

adalah bahwa jiwa pendidik tidak dapat ditanamkan dalam waktu singkat. Proses itu berlangsung dari sejak mahasiswa masuk pada semester pertama sampai dengan saat ujian tugas akhir. Taruhlah pandangan itu benar, pertanyaannya adalah bagaimana “jiwa pendidik” itu ditanamkan? Jawabannya tentu tidak dapat dengan alasan bahwa Pendidikan Belajar-Mengajar (PBM) disebar dari semester awal sampai akhir, karena berarti “jiwa pendidik” berada dalam mata kuliah-mata kuliah PBM, sehingga hasilnya akan relatif sama antara disatukan menjadi 1 tahun atau disebar dalam banyak semester. Kritik itu akan kuat apabila mampu ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mata kuliah-mata kuliah Bidang Studi (BS) di Pendidikan Sejarah dengan yang diajarkan di Ilmu Sejarah. Dengan kata lain, alasan yang dapat digunakan adalah bahwa pendidikan guru berlangsung integratif dengan semua perkuliahan atau yang dikenal sebagai model *concurrent* dan bukan *consecutive*. Diperlukan bukti yang kuat untuk mendukung pendapat bahwa pendidikan guru di Indonesia dewasa ini menggunakan model *concurrent*. Dari sudut pandang ini, pertanyaannya adalah adakah perbedaan esensial yang terkait pada isi antara mata kuliah Metode Sejarah, Sejarah Pergerakan Nasional, Sejarah Asia Timur dan sebagainya antara yang diajarkan di Pendidikan Sejarah dengan yang terdapat di Ilmu Sejarah?

Dilihat dari silabus antara mata kuliah yang sama atau sejenis, sulit untuk mengatakan bahwa antara Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah terdapat perbedaan esensial yang signifikan. Sebagai gambaran adalah mata kuliah Sejarah Eropa Klasik. Silabus mata kuliah Sejarah Eropa Klasik di Prodi Pendidikan Sejarah adalah sebagai berikut (Untuk efisiensi, hanya ditampilkan 3 dari 7 kolom):

| KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN | INDIKATOR |
|---|---|---|
| 1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menyimpulkan berbagai sumber sejarah, pengertian, ungkapan dan dampak peradaban klasik Yunani dan Romawi | 1. Sumber sejarah Yunani dan Romawi klasik dan proses penggaliannya. | 1. Menjelaskan tokoh dan sumber sejarah untuk Yunani dan Romawi klasik. |
| | 2. Konsep peradaban, kebudayaan dan ungkapan-ungkapan peradaban Yunani serta Romawi klasik. | 2. Menganalisis, membandingkan dan menjelaskan makna peradaban, ungkapan-ungkapannya baik di Yunani maupun di Romawi. |

| KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN | INDIKATOR |
|---|---|---|
| 2. Membandingkan, menganalisis dan menyimpulkan kehidupan dan perkembangan politik, sosial-ekonomi, budaya, filsafat dan iptek bangsa: Yunani sejak abad ke 6 BC dan Romawi abad ke 2 BC hingga keruntuhannya pada abad ke 5 Masehi serta dampaknya untuk Eropa | 1. Kehidupan di polis-polis Yunani dalam bidang politik, sosial-ekonomi, kebudayaan, iptek dan filsafat. | 1. Menganalisis, membandingkan dan menjelaskan seluk beluk ciri, kehidupan politik, sosial-ekonomi, budaya, filsafat dan iptek polis-polis di Yunani. |
| | 2. Dari Republik sampai kekaisaran Romawi: aspek sosial-ekonomi, politik, kebudayaan dan iptek. | 2. Menganalisis, membandingkan dan menjelaskan kehidupan sosial-ekonomi, politik, budaya dan filsafat dari masa Republik sampai kekaisaran Romawi. |
| | 3. Kekaisaran Romawi dalam kehidupan politik, sosial-ekonomi, budaya dan dampaknya bagi Eropa dan Timur Tengah. | 3. Menganalisis dan menjelaskan kehidupan politik, sosial-ekonomi, budaya dan dampaknya bagi Eropa dan Timur Tengah. |
| 3. Menganalisis dan menyimpulkan perkembangan Kekristenan dan Bizantium dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan agama serta dampaknya untuk Eropa | 1. Masuk, latarbelakang perkembangan Kekristenan dan dampaknya untuk Eropa. | 1. Menganalisis dan menjelaskan latarbelakang perkembangan Kekristenan dan dampaknya untuk Eropa. |
| | 2. Sebab runtuhnya Romawi Barat dan terbentuk dan perkembangan Bizantium. | 2. Menganalisis dan menjelaskan Sebab runtuhnya Romawi Barat dan terbentuk dan perkembangan Bizantium. |

Sedang di Prodi Ilmu Sejarah, silabusnya adalah sebagai berikut:

| |
|---|
| <p>Tujuan: mahasiswa mampu memahami tahap-tahap perkembangan kebudayaan masyarakat Barat periode Klasik, kecenderungan-kecenderungan setiap tahap, kontinuitas dan perubahan antar tahap, serta kebudayaan yang dihasilkannya dalam setiap tahap.</p> <p>Cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peradaban Pra Eropa: Mesir-Mesopotamia, 2. Peradaban Yunani, 3. Sejarah Peradaban Romawi, 4. Pertumbuhan dan Perkembangan agama Kristen di Eropa. |
|---|

Dari kedua silabus nampak bahwa format yang digunakan oleh Pendidikan Sejarah jauh lebih baik, karena sesuai dengan KTSP dan disusun dengan berlandas pada kompetensi. Akan tetapi, apabila dicermati lebih mendalam, secara esensial kedua silabus sama, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyusun eksplanasi (menjelaskan) sejarah Eropa pada periode Klasik.

Permasalahannya apakah berbagai kesamaan sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh Pendidikan Sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan atau sekedar “salah jalan” yang terjadi pada prodi Pendidikan Sejarah? Apabila mata kuliah yang disusun dalam kurikulum sungguh-sungguh telah sesuai dengan tanggungjawab keilmuan pendidikan sejarah, berarti hubungan antara Ilmu Sejarah dengan Pendidikan Sejarah adalah dikodratkan bagaikan ibu dan anak. Dengan kata lain, Pendidikan Sejarah merupakan hasil pengembangan/penyederhanaan/adaptasi Ilmu Sejarah untuk tujuan pendidikan. Hubungan semacam itu mengingatkan pada definisi Ilmu Pengetahuan Sosial yang dipakai di Indonesia, yaitu sebagai *penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan*. Meskipun demikian, nasib IPS jauh lebih buruk, karena pada tahun 2001 muncul kurikulum yang mengganti nama IPS menjadi Ilmu Sosial (G. Moedjanto pada *Kompas* 26 Mei 2003)

Posisi sebagai adaptasi Ilmu Sejarah untuk tujuan pendidikan menjadikan sulit untuk mempertahankan pandangan bahwa pendidikan keguruan menggunakan model *concurrent*. Realitas yang berlangsung sebagai praksis selama ini lebih mencerminkan bahwa proses pendidikan guru menggunakan model *consecutive*, yaitu dimulai dengan penguasaan disiplin ilmu tertentu sesuai mata pelajaran di sekolah menengah, lalu ditambah (*plug-in*) penguasaan kemampuan ilmu kependidikan. Dalam kondisi semacam itu, Pendidikan Sejarah akan selalu berada dalam posisi tergantung atau bahkan terhanyut dalam dinamika perkembangan Ilmu Sejarah. Contoh yang paling mudah adalah terdapatnya mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah. Mata kuliah itu sangat penting bagi mahasiswa Ilmu Sejarah, karena di dalamnya dikaji tentang hakekat dan kedudukan ilmu sejarah diantara ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya. Akan tetapi, akan menyedihkan apabila mata kuliah tersebut menjadi kurikulum inti Pendidikan Sejarah. Peserta

didik pada Pendidikan Sejarah akan memahami dengan sangat baik hakekat dan kedudukan Ilmu Sejarah, sebaliknya sama sekali buta tentang hakekat dan kedudukan Pendidikan Sejarah.

Ketergantungan dan keterhanyutan akan menjadikan Pendidikan Sejarah selalu berada dalam krisis, terutama adalah krisis identitas keilmuan. Dia tidak tahu siapa dirinya dan apa tanggungjawab atau tugasnya. Hal itu antara lain tampak dari tetap berlangsungnya PPG, meskipun berarti mencoreng muka dunia keguruan. Kondisi ini sangat membahayakan, tidak hanya bagi keberlangsungan Pendidikan Sejarah sendiri, tetapi juga bagi generasi muda Indonesia pada umumnya. Mereka merasa Pendidikan Sejarah sebagai mata pelajaran yang membosankan dan tidak bermanfaat untuk mengembangkan kehidupan di masa sekarang.

Mungkinkah krisis yang menimpa Pendidikan Sejarah dapat diatasi? Untuk tetap eksis, tentu jawabnya harus mungkin. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi krisis dengan cepat dan tepat. Salah satu langkah yang akan menjadi fokus tulisan ini adalah kembali ke titik nol, yaitu dengan melakukan refleksi tentang pengertian Pendidikan Sejarah. Refleksi dan redefinisi itu sangat penting bagi keberlanjutan Pendidikan Sejarah, karena dari sanalah sumber eksistensi dirinya dalam dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Hanya melalui langkah tersebut *positioning* dan pengambilan peran secara bertanggungjawab dapat dilakukan oleh Pendidikan Sejarah di masa kini dan masa depan.

B. Redefinisi Pendidikan Sejarah

Setiap ilmu memiliki karakteristik yang unik. Berdasar karakteristik tersebut ilmu pengetahuan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu alam menempatkan benda-benda dan fenomena alam sebagai kajian dengan tujuan untuk menemukan hukum-hukumnya, sehingga manusia dapat memanipulasinya demi peningkatan kenyamanan hidup. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora memiliki subyek kajian yang sama, yaitu manusia. Perbedaannya, ilmu-ilmu sosial lebih fokus pada perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sosial. Secara epistemologis, sejak memasuki jaman modern ilmu-ilmu sosial berusaha untuk menemukan pola dan hukum perilaku manusia. Berbeda dengan itu, humaniora berusaha memahami aspek kemanusiaan dari manusia

dan mengembangkannya agar menjadi pribadi utuh.

Pendidikan sebagai salah satu bagian dari Humaniora merupakan ilmu yang berusaha mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. N. Driyarkara dengan sangat cerdas merumuskan pendidikan sebagai usaha pemanusiaan manusia muda. Pendidikan merupakan proses pengembangan generasi muda agar menjadi manusia seutuhnya, dalam arti dewasa lahir dan batin.

Dari pengertian pendidikan dapat dipahami bahwa pada hakekatnya pendidikan menempatkan manusia sebagai fokus utama. Aspek kemanusiaan manusia, meminjam pandangan Heidegger (1996), dibagi menjadi dua, yaitu *da-sein* atau *beings* dan *sein* atau *being*. Magnis Suseno menterjemahkan *dasein* sebagai pengada, sedang F. Budi Hartono memaknai "ada-di-sana" (dibaca sebagai satu kata utuh, bukan kalimat). *Da-sein* adalah istilah Heidegger untuk menunjukkan bahwa struktur ontologis manusia berbeda dengan benda-benda atau makhluk hidup lainnya. Benda berlangsung dalam waktu, bergerak dari satu 'kini' ke 'kini' yang lainnya. Bagi benda, 'masa lalu' tidak ada lagi dan 'masa depan' belum ada. Berbeda dengan benda, *Da-sein* memiliki dan menguasai waktu. *Da-sein* dalam temporalitasnya mengalami perubahan, pertumbuhan atau perkembangan.

Da-sein bersifat "faktisitas" (*given*), yaitu di luar kemauannya, terdampar di dunia dengan kondisi dan situasi tertentu. Seperti saat manusia terlahir ke dunia, ia terlempar, hadir begitu saja dalam dunia ini. Manusia sebagai *da-sein* larut dalam keseharian (*besorgen*), hadir bersama dengan yang lain, baik dengan perangkat teknologi yang siap pakai (*zuhandenes*), atau bersama *da-sein* lainnya. Perilaku yang di luar kemauan sendiri merupakan akibat dari kemalasan berpikir (*thoughtlessness*) dapat membuat *da-sein* terlibat dalam kejahatan secara lugas. Meski jumlah korbannya sangat banyak dan mengerikan, *da-sein* tidak merasa bersalah dan bahkan bangga dengan tindakannya. (A. Sudiarja, 2008: 40) Dalam keterlarutan itu *Da-sein* terhanyut, sehingga tidak dapat dimintai dan dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam dunia modern, gambaran *da-sein* dilukiskan dengan sangat menarik oleh Fromm (1961) dengan kekuatan kapitalisme sebagai arus yang menghanyutkan dan mengakibatkan terjadinya kehampaan dan keterasingan diri. Kapitalisme dilahirkan memang untuk menciptakan

dan mengembangkan "kebutuhan-kebutuhan" baru yang memaksa orang untuk melakukan pengorbanan baru, menempatkan orang pada ketergantungan baru dan memikat orang ke dalam kenikmatan baru yang akhirnya menjerumuskan orang pada kehidupan konsumtif. Fromm menjelaskan bahwa setiap produk baru yang dikeluarkan industri kapitalis berpotensi untuk terjadinya penipuan dan perampokan:

Every new product is a new potentiality of mutual deceit and robbery. Man becomes increasingly poor as a man; he has increasing need of money in order to take possession of the hostile being. The power of his money diminishes directly with the growth of the quantity of production, i.e., his need increases with the increasing power of money. The need for money is therefore the real need created by the modern economy, and the only need that it creates. The quantity of money becomes increasingly its only important quality. (1961: 140)

Dalam situasi seperti itu, orang sangat mudah terhanyut dan memaknai eksistensi diri dan modernitas dengan jumlah harta benda yang berhasil dibeli, dikonsumsi dan dimiliki (*sense of having*). Orang tidak lagi mampu membedakan kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Semua keperluan dipandanginya sebagai kebutuhan (*need*), yang dengan segala cara harus dipenuhi.

The man who has thus become subject to his alienated needs is "a mentally and physically dehumanized being...the self-conscious and self-acting commodity." 28 This commodity-man knows only one way of relating himself to the world outside, by having it and by consuming (using) it. The more alienated he is, the more the sense of having and using constitutes his relationship to the world. "The less you *are*, the less you express your life, the more you *have*, the greater is your *alienated* life and the greater is the saving of your alienated being." ...

Thus *all* the physical and intellectual senses have been replaced by the simple alienation of *all* these senses; the sense of *having*. The human being had to be reduced to this absolute poverty in order to be able to give birth to all his inner wealth. (On the category of *having* see Hess in *Einundzwanzig Bogen*.)

Heidegger menjelaskan bahwa keterhanyutan *da-sein* itu dapat terhenti oleh benturan kehidupan yang sangat keras. Pepatah mengatakan bahwa hidup bagaikan roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Ketika menuju ke atas disebut “berkembang”, sedang ketika menuju ke bawah disebut “merosot”. Kemerosotan yang terjadi secara tiba-tiba dan menyentak dapat melepaskan *da-sein* dari keterlarutan kehidupan dunia. Dalam situasi seperti itulah *da-sein* mulai mengakrabi *stimmung* (suara hati nurani) terutama yang berkaitan perasaan yang paling mendasar: terasing, cemas dan rasa takut tak berobyek (*Angst*) dan kematian. Pergumulan *da-sein* berpuncak pada lahirnya *sein/being* (kesadaran diri) sebagai sumber eksistensi. Pendidikan, dalam konteks ini, merupakan proses pengembangan kesadaran diri peserta didik, tanpa harus mengalami sendiri pahitnya penderitaan, ketersingkirkan, keterbuangan dan ketertekanan. Pendidikan Sejarah, sebagai bagian dari ilmu pendidikan, secara formal juga memiliki subyek kajian manusia, yaitu dalam pembentukan generasi muda yang berkesadaran atau *sein*.

C. Tanggungjawab Pendidikan Sejarah

Aspek kesadaran manusia yang menjadi tanggungjawab Pendidikan Sejarah dirumuskan sebagai penanaman dan pengembangan kesadaran sejarah dalam diri peserta didik. Secara sederhana kesadaran sejarah dapat diartikan sebagai kemampuan mental dalam menggunakan dan atau memanfaatkan secara reflektif pengalaman historis untuk memahami dan menyikapi secara kritis berbagai fenomena yang dihadapi pada masa kini. Dengan demikian, pengalaman historis yang terjadi di masa lampau diposisikan sebagai referensi penting untuk menyikapi kehidupan masa kini dan merencanakan masa depan.

Sebagai makhluk yang hidup dan dibentuk dalam sejarah, pemahaman manusia tidak bisa lepas dari sejarah. Untuk memahami teks, peristiwa, situasi dan keadaan yang ada pada masa kininya, manusia tidak berangkat dari ruang yang hampa. Dalam dirinya telah ada pengetahuan dan kesadaran sejarah yang mempengaruhi, bahkan menentukan, manusia dalam memaknai sesuatu. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.

Secara positif, kesadaran sejarah akan membantu dan mempertajam manusia dalam menjalani kehidupannya di masa kini,

baik dalam pengertian kepekaan nurani maupun kemanusiaannya. Secara negatif, kesadaran sejarah akan menghambat dan menghalangi berbagai inovasi kreatif, terutama inovasi yang tidak sesuai dengan alur pengalaman historisnya. Dalam ungkapan yang lebih netral, kesadaran historis menjadikan manusia mampu secara otonom memilih dan menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek rasionalitas, sosial maupun kultural.

Pertanggungjawaban rasional dalam konteks ini adalah bahwa kebenaran keputusannya dapat diuji, menurut istilah Habermas (1986), melalui diskusi kritis atau diskursus. Pengujian klaim kebenaran melalui tiga aspek, yaitu aspek logis, dialogis dan retorik. Aspek logis adalah pengujian terhadap kekuatan argumen yang disusun dan konsistensinya. Hal ini menuntut pemilik klaim kebenaran untuk menyusunnya dalam kalimat yang jelas dan membedakan (*clear and distinct*), bebas dari kontradiksi serta menggunakan pengertian atau makna secara konsisten.

Aspek dialogis adalah kondisi yang menuntut semua partisipan diskusi kritis untuk mempertimbangkan klaim-klaim yang dipersoalkan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati, tanpa menghiraukan kebutuhan-kebutuhan sesaat. Dengan kata lain, Habermas menjelaskan bahwa para partisipan diskusi harus merupakan manusia yang lepas dari pusat (*decentered*), yaitu manusia yang dengan jernih mampu memilah dunia obyektif (fakta-fakta), dunia sosial (relasi intersubjektif) dan dunia subyektif (pengalaman pribadi) serta dapat memahami kebenaran secara rasional.

Aspek ketiga adalah retorik, yaitu situasi diskusi kritis harus diwarnai oleh kesetaraan posisi, kesetaraan kesempatan dan kebebasan. Kesetaraan posisi dalam konteks ini, yaitu dimana setiap partisipan memperoleh peluang yang sama untuk memilih dan melakukan *speech acts* mereka. Selain itu, partisipan juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan tuturan konstantif, seperti mengemukakan atau mempertanyakan, menerima atau menyangkal, menjelaskan atau mendebat dan seterusnya. Syarat berikutnya adalah terdapatnya kebebasan - yang disebut Habermas dengan "situasi bertutur yang ideal" - dalam arti diskusi berlangsung tanpa kekangan dan bebas dari pengaruh distorsif, baik dari dominasi terbuka, perilaku strategis secara sadar, maupun penipuan diri. Selanjutnya, konsensus yang menjamin kebenaran klaim harus "didorong oleh motivasi rasional," semata-mata karena kekuatan argumentasi dan bukan karena faktor kontingan dan

eksternal.

Pertanggungjawaban sosial dalam konteks ini adalah bahwa kebenaran keputusannya sesuai dengan etika sosial yang berkembang di masyarakat. Pertanggungjawaban dilakukan dengan pengujian terhadap suatu keputusan dari sudut pandang kebenaran dan ketepatannya (Jawa: *bener lan pener*). Keputusan pemerintah untuk membeli pesawat kepresidenan kemungkinan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek kebenaran, karena secara ekonomis lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, banyak pandangan yang meragukan ketepatan keputusan tersebut, terutama terkait kondisi kehidupan masyarakat yang sedang paceklik serta banyaknya bencana akibat tingginya curah hujan. Kebenaran dan ketepatan keputusan akan mengembangkan kerukunan dan kepaduan kehidupan sosial masyarakat. Apabila suatu keputusan justru berakibat sebaliknya, maka perlu dicurigai bahwa keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

Pertanggungjawaban kultural dalam arti kebenaran keputusannya mampu mengemansipasi masyarakat sesuai dengan identitas budaya yang dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan mengukur kesesuaian suatu keputusan dari aspek identitas kultural masyarakat setempat. Keputusan dipandang tepat apabila mampu memperkokoh pemahaman masyarakat tentang siapa diri mereka dan kemana hidup harus diarahkan, semakin meyakini berbagai keutamaan yang dijadikan landasan untuk mengarungi dan memaknai kehidupan masa kini dan mendatang. Sebaliknya, keputusan dipandang tidak tepat apabila justru menghancurkan identitas kultural masyarakat yang dibangun secara turun temurun. Sebagai contoh adalah wacana yang hendak menjadikan Yogyakarta sebagai Serambi Madinah perlu diuji, misalnya, dengan identitas Yogyakarta sebagai kota budaya yang telah eksis sebelumnya. Apabila antar keduanya senafas dan memperkokoh identitas awalnya, maka keputusan tersebut dikategorikan dapat dipertanggungjawabkan secara kultural.

D. Membandingkan Pendidikan Sejarah dengan Ilmu Sejarah

| KOMPONEN | PENDIDIKAN SEJARAH | ILMU SEJARAH |
|----------------------|--|--|
| Subyek kajian | Kemanusiaan Manusia Muda | Peristiwa yang terjadi di masa lampau |
| Tujuan | Menanamkan dan mengembangkan kesadaran sejarah | Menjelaskan (eksplanasi) peristiwa yang terjadi di masa lampau |
| Cara Mencapai Tujuan | Pembelajaran | Penelitian |
| Hasil | Generasi muda yang berkesadaran sejarah | Historiografi yang ilmiah |

Dari tabel di atas tampak bahwa pada hakekatnya Pendidikan Sejarah berbeda dengan Ilmu Sejarah. Pendidikan Sejarah memiliki subyek kajian kemanusiaan manusia muda. Di sisi lain, Ilmu Sejarah menempatkan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau sebagai subyek kajian. Perbedaan juga dapat disimak dari aspek epistemologi masing-masing disiplin ilmu. Pendidikan Sejarah bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan kesadaran sejarah dalam diri generasi muda, sedang Ilmu Sejarah bertujuan untuk menyusun eksplanasi (penjelasan) tentang peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Oleh karena secara epistemologis berbeda, maka fokus aktivitasnya pun sendiri-sendiri. Pendidikan Sejarah menekankan aktivitasnya pada pembelajaran, sedang Ilmu Sejarah berfokus pada penelitian. Akhirnya hasil dari semua proses yang dilakukan oleh Pendidikan Sejarah adalah terbentuknya generasi muda yang berkesadaran sejarah, yaitu menjadikan pengalaman historis sebagai referensi dalam menyikapi kehidupan masa kini. Di sisi lain, pergumulan yang dilakukan oleh Ilmu Sejarah bermuara pada lahirnya historiografi yang memiliki kebenaran ilmiah, yaitu didukung oleh sumber yang memadai (korespondensi) dan selaras dengan kebenaran umum (koherensi). (F.R. Ankersmit, 1987, 110 - 117)

Meskipun berbeda secara hakiki, Pendidikan Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan Ilmu Sejarah. Keeratan hubungan itu terutama pada tahap persiapan pembelajaran, yaitu di dalam penyusunan bahan ajar. Untuk menanamkan kesadaran sejarah, Pendidikan Sejarah membutuhkan hasil kajian Ilmu Sejarah yang berupa historiografi. Apabila dianalogikan dengan industri, historiografi merupakan bahan baku. Untuk menjadi barang siap konsumsi, yang

dalam Pendidikan Sejarah dikenal sebagai bahan ajar, bahan baku tersebut harus melalui berbagai tahap pengolahan. Dengan kata lain, historiografi yang dihasilkan oleh Ilmu Sejarah tidak layak dan pantas untuk secara langsung dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran pada Pendidikan Sejarah. Dari sudut pandang ini, pengolahan historiografi sebagai bahan baku untuk menjadi bahan ajar menjadi salah satu kompetensi terhadap metodologi yang khas dalam Pendidikan Sejarah.

E. Penutup

Artikel singkat ini berusaha membuktikan bahwa hakekat Pendidikan Sejarah adalah jauh berbeda dengan hakekat Ilmu Sejarah, baik ontologis maupun epistemologis. Apabila dalam praksis terdapat berbagai kesamaan antar keduanya, lebih merupakan “salah jalan”, terutama dari pihak Pendidikan Sejarah. Berbagai fenomena yang mengindikasikan terdapatnya krisis identitas pada Pendidikan Sejarah, seperti PPG dan pengurangan jam pelajaran sejarah di sekolah. Meski bukan satu-satunya penyebab, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam masyarakat, juga merupakan bukti bahwa Pendidikan Sejarah telah gagal dalam mengemban tugas utamanya, yaitu menanamkan dan mengembangkan kesadaran sejarah dalam diri masyarakat Indonesia.

Berbagai dampak negatif dari krisis identitas keilmuan Pendidikan Sejarah perlu disikapi dengan rasional dan dewasa. Akan lebih baik apabila hal tersebut dijadikan momentum untuk melakukan refleksi kritis terhadap berbagai keputusan akademis yang pernah dilakukan. Kembali ke titik nol, yaitu pada landasan filosofis Pendidikan Sejarah, yang menjadi fokus artikel ini, diharapkan mampu menjadi *trigger* bagi semua pihak untuk berefleksi, melakukan diskursus dan pembenahan bagi masa depan bersama yang lebih baik.

Oleh karena masa sekarang merupakan jaman kompetensi, maka Pendidikan Sejarah perlu mencari rumusan kompetensi dasar dan indikator yang secara tepat menggambarkan ketercapaian penanaman dan pengembangan kesadaran sejarah. Istilah-istilah seperti “mendeskripsikan”, “menjelaskan”, “menganalisis”, dan sebagainya yang selama ini umum digunakan kurang *applicable* untuk mengukur penggunaan pengalaman historis sebagai referensi peserta didik dalam menghadapi permasalahan hidup mereka saat ini. Istilah-istilah itu lebih cocok untuk dijadikan kompetensi dalam eksplanasi peristiwa sejarah yang menjadi subyek kajian Ilmu Sejarah.

Kepustakaan

Ali Usman, ed., 2006, *Kebebasan Dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama*. Yogyakarta: Pilar Media.

Ankersmit, 1987, *Refleksi Tentang Sejarah*. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: PT Gramedia.

Fromm, Erich, 1961, *Marx's Concept of Man*. Translated in English by T. B. Bottomore. New York: Frederick Ungar Publishing Co. E-book. Diunduh dari www.avaxhome.ws

Heidegger, Martin, 1996, *Being and Time*. Translated in English by Joan Stambaugh. New York: SUNY. E-book. Diunduh dari www.avaxhome.ws

Jurgen Habermas, 1986, *The Theory of Communicative Action. Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press. E-book. Diunduh dari www.avaxhome.ws

Sastrapratedja, M., 2001, *Pendidikan Sebagai Humanisasi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Sudiarja, A., 2008, *Mengapa Koruptor Bergeming dan Keyakinan Menjadi Keras: Telaah tentang "Jatidiri" Manusia di Era Global*. Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Kompas 26 Mei 2003

Silabus Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

Silabus KTSP Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sanata Dharma

www.en.wikipedia.org

<http://forumteologi.com/blog/2007/06/01/relevansi-kesadaran-sejarah-dalam-teologi/>

http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=54

~~~~~